Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside
p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 5 No. 1 Januari - April 2025

ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) PADA PEMENRINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Boyke Martz Siagian[1]
[1]Universitas Hasanuddin
Email : boykemartz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Implementasi KKPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi ini mengidentifikasi proses implementasi, kendala yang dihadapi, serta dampak KKPD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi KKPD telah dimulai dengan baik, masih terdapat kendala terkait jaringan dan sosialisasi di beberapa wilayah. Dampak positif dari KKPD meliputi pengurangan penggunaan uang tunai dan peningkatan transparansi transaksi keuangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses implementasi KKPD di masa depan.
Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah Daerah, KKPD, Sulawesi Selatan, pengelolaan keuangan daerah, efisiensi, transparansi.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Local Government Credit Cards (KKPD) in the South Sulawesi Provincial Government. The implementation of the KKPD aims to increase efficiency and transparency in regional financial management. This study identifies the implementation process, obstacles faced, and the impact of KKPD on regional financial management. The results of the study show that although the implementation of the KKPD has started well, there are still obstacles related to networking and socialization in several regions. The positive impact of the KKPD includes reducing the use of cash and increasing the transparency of financial transactions. This study provides recommendations for improving the KKPD implementation process in the future.
Keywords: Local Government Credit Cards, KKPD, South Sulawesi, regional financial management, efficiency, transparency.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana mengimplementasikan sistem Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah daerah di Indonesia telah beralih menggunakan KKPD untuk berbagai keperluan seperti perjalanan dinas, pembelian barang, dan jasa. Melalui KKPD, pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah diaudit.

Untuk mengimplementasikan KKPD, Menteri Dalam Negeri mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

pada tanggal 10 Juni 2022. Dalam peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan pembayaran non-tunai melalui KKPD. Pengaturan ini mencakup pembagian Uang Persediaan (UP) menjadi 60% UP Tunai dan 40% UP KKPD, dengan kemungkinan penyesuaian proporsi hingga maksimum 70% untuk kebutuhan khusus.

Implementasi KKPD dimulai dengan sosialisasi, penyiapan regulasi daerah, seperti Peraturan Gubernur, dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan bank penerbit. Proses awal ini juga melibatkan penetapan pemegang dan administrator KKPD, serta pengurusan dokumen administratif lainnya. Selain itu, pentingnya monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri juga ditekankan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan KKPD. Dengan diterapkannya KKPD, diharapkan dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengelolaan keuangan yang lebih modern, aman, dan transparan di seluruh daerah Indonesia.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan telah meneruskan instruksi tersebut di wilayah kerjanya. Selain itu, pada tanggal 29 Agustus 2023 BKAD Sulawesi Selatan juga telah melaksanakan sosialisasi tentang peraturan implementasi KKPD dan sampai dengan akhir 2023 sudah ada 5 perangkat daerah yang menginmpelentasikannya. Pelaksanaan implementasi tersebut dilakukan secara bertahap dan sampai dengan 2024, perangkat daerah yang sudah mengimplementasikan terlah bertambah menjadi 10 perangkat daerah (Salehuddin, 2024). Meskipun berbagai upaya percepatan implementasi KKPD telah ditempuh, sampai dengan 11 Juni 2024, implementasi KKPD pada perangkat daerah di wilayah Sulawesi Selatan belum berjalan penuh. Hal ini disebabkan karena beberapa tempat di Sulawesi Selatan masih memiliki kendala terkait dengan jaringan. Untuk mengatasi kendala ini, telah dikerahkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) (Salehuddin, 2024).

Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside
p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 5 No. 1 Januari - April 2025

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mengidentifikasi kendala dan dampak yang muncul selama proses implementasi. Subjek penelitian ini adalah seorang pejabat di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terlibat dalam implementasi KKPD, yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sementara objek penelitian adalah sistem KKPD yang diimplementasikan, termasuk proses sosialisasi, penerbitan peraturan, dan penggunaan kartu kredit dalam pengelolaan keuangan daerah.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-struktur dengan pejabat terkait, dokumentasi melalui dokumen resmi, dan observasi langsung untuk memahami konteks penggunaan KKPD. Prosedur penelitian meliputi persiapan penelitian dengan menyusun proposal, mengidentifikasi subjek, memperoleh izin penelitian, dan menyiapkan instrumen; pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi; analisis data menggunakan metode analisis tematik dan teknik triangulasi; validasi data melalui teknik triangulasi dan diskusi dengan subjek penelitian; serta pelaporan hasil penelitian yang mencakup penyusunan laporan, presentasi hasil kepada pihak terkait, dan penyusunan rekomendasi untuk perbaikan proses implementasi KKPD di masa mendatang.

Gambar 1. ***Sesi Wawancara (2023)***

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi KKPD di Provinsi Sulawesi Selatan

Implementasi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimulai sejak diterbitkannya Permendagri 79 tahun 2022. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Salehuddin, menyatakan bahwa setelah Permendagri tersebut terbit, pemerintah daerah langsung bergerak melakukan sosialisasi, menyusun peraturan gubernur (Pergub), dan bekerja sama dengan bank untuk penerbitan kartu kredit

Pada bulan September, Pergub ditetapkan dan pada bulan Oktober, kartu kredit sudah ada dan telah dico-branding dengan Bank Mandiri. Ini menunjukkan kecepatan dan efisiensi dalam proses implementasi.

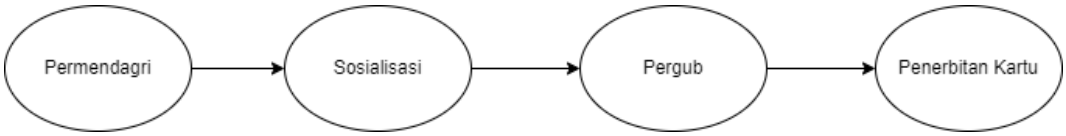

Gambar 2. *Timeline Implementasi KKPD*

Pelaksanaan KKPD di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pelaksanaan KKPD di Sulawesi Selatan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2023, lima perangkat daerah sudah menerapkan KKPD, dan pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi sepuluh perangkat daerah. Proses ini dilakukan perlahan tetapi pasti untuk memastikan kesiapan setiap OPD dalam menggunakan KKPD.

Tabel 1. Progres Pelaksanaan KKPD di OPD

Tahun	Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan KKPD
2023	5
2024	10

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan

No	Bulan	Keterangan
1	1-2	Persiapan dan koordinasi dengan pihak bank penerbit.
2	3-4	Pelatihan dan sosialisasi kepada OPD terkait.
3	5-6	Implementasi awal dan uji coba di beberapa OPD

		terpilih.
4	7-8	Evaluasi awal dan perbaikan jika diperlukan.
5	9	Pelaksanaan penuh di seluruh OPD.

Kendala dan Solusi dalam Implementasi KKPD

Salah satu kendala utama dalam implementasi KKPD adalah kesiapan bank dan OPD. Namun, bank selalu siap karena penerbitan kartu kredit sudah menjadi tanggung jawab mereka. Untuk OPD, kendala lebih banyak terletak pada sosialisasi dan penyesuaian sistem baru.

Dampak Implementasi KKPD

Implementasi KKPD telah memberikan beberapa dampak positif. Salah satu dampaknya adalah kemudahan dalam pengelolaan anggaran terutama dalam hal penyediaan makan minum dan ATK. Dengan KKPD, pemerintah daerah tidak perlu lagi mengandalkan pihak ketiga untuk menalangi biaya, selain itu KKPD juga mempercepat proses belanja dan realisasi dalam APBD serta mengurangi kecurangan karena transaksi non-tunai lebih mudah diawasi.

Rencana Pengembangan dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana untuk memperluas penggunaan KKPD, termasuk untuk perjalanan dinas yang direncanakan mulai diterapkan pada tahun 2024. Namun, masih ada tantangan yang mana terkait dengan infrastruktur, seperti ketersediaan mesin EDC di seluruh daerah yang belum merata.

Di beberapa daerah terdapat kendala yaitu jaringan yang masih sulit dijangkau, sehingga penerapan digitalisasi memerlukan waktu lebih lama. Pemerintah daerah terus bekerja sama dengan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mengatasi kendala ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses implementasi yang dimulai sejak terbitnya

Permendagri 79 tahun 2022 telah berjalan dengan baik, meskipun menghadapi beberapa kendala seperti kesiapan bank dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Implementasi yang dilakukan secara bertahap dari lima perangkat daerah pada tahun 2023 hingga sepuluh perangkat daerah pada tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sistem baru ini. Implementasi KKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya KKPD, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan dapat ditingkatkan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi KKPD, terutama terkait sosialisasi dan pelatihan bagi staf OPD, dapat diatasi dengan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah. Dampak positif yang dirasakan termasuk kemudahan dalam pengelolaan anggaran, percepatan proses belanja dan realisasi dalam APBD, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui transaksi non-tunai. Penggunaan KKPD juga telah membantu mengurangi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Salehuddin. Dengan ini, penulis mengajukan proposal implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan berharap mendapat dukungan penuh dari semua pihak terkait untuk keberhasilan program ini.

Ke depannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana untuk memperluas penggunaan KKPD, termasuk untuk perjalanan dinas yang akan diterapkan mulai tahun 2024. Rencana ini memerlukan peningkatan infrastruktur pendukung seperti ketersediaan mesin EDC di seluruh daerah. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan KKPD juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dan mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan implementasi KKPD dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 10 Juni 2022.

Silalahi, Andres Leiman. 2018. “Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Untuk Pembayaran Belanja Negara Melalui Uang Persediaan.” Indonesian Treasury Update Volume 3, no. 1 (Januari-Februari): 4-6.

Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen Kas Pemerintah:Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen. DOI: https:// doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005

Novitasari, T., & Halim, A. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (Studi pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang).

Sriyani, I., Samudra, I. K. B., & Syahputra, B. D. A. (2022). Implementasi kartu kredit pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura. Jurnal Manajemen Retail Indonesia, 3(1).

Salehuddin. "[KePo] | Implementasi Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah" Youtube, diunggah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, 11 Juni 2024, https://youtu.be/Q7rm8K13-KY?si=UKQNMoRuZFfr-if2

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 28 Desember 2022.